

## **INOVASI KEBIJAKAN : STRATEGI TERPADU MENURUNKAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG**

**Oleh : Rahmad Purwanto W**

[purwantountag@gmail.com](mailto:purwantountag@gmail.com)

### *Abstract*

*The Semarang City Government has regional innovations that can be examples of good practice in the framework of integrated poverty reduction implemented between regional apparatuses in collaboration with the business community and community participation. Innovation programs include two approaches, namely: (1) reducing the burden of living costs of the poor and (2) programs that directly target poverty.*

*Implementation of poverty alleviation programs with a legal umbrella, namely: Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning Poverty Reduction and (2) Regional Regulation Number 11 of 2017 concerning Changes in Semarang City's RPJMD in 2016 - 2021 which illustrates the alignments of the development of the City of Semarang for the poor, vulnerable and marginalized groups (marginal) through the following efforts:*

- 1. Reducing the burden of living costs so that the poor can meet the needs of living with their families, including non-cash food assistance, scholarship, BRT transportation, health services with BPJS, UHC and great ambulances in the city of Semarang;*
- 2. Poor families or vulnerable groups can meet the needs of decent living and have access to basic services and increase access to clean water, prevent open defecation, handling green open space and increase city parks as family recreation facilities;*
- 3. Expanding access to the poor / vulnerable groups in public services including health services, education, skills training, smart homes, thematic village development.*

*The implementation of innovation programs in the context of poverty alleviation is increasingly being improved by involving stakeholders from the business community (through the Corporate Social Responsibility / CSR Program), universities through Thematic Community Service Program and Community Service and Research, Non-Governmental Organizations and Public Participation both from ulama circles (through Basis, peer scholarships, foster children and others) improve education, health and pioneering micro / small businesses*

*Keywords: Policy Innovation, Poverty, Semarang City*

## A. Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas pembangunan secara global. Komitmen PBB dalam penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas penting dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG`s*) rancangan aksi bersama yang ditetapkan dalam 17 Agenda Pembangunan antara lain mewujudkan dunia tanpa kemiskinan tahun 2016 -2030. Aksi bersama dan kemitraan secara global dan mengembangkan berbagai potensi masyarakat dunia. Indonesia telah berkomitment melaksanakan TPB berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk Kota Semarang. Menyadari hal tersebut maka pemerintah Kota Semarang telah mengambil langkah kebijakan strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan memberikan sumbangsih menyelesaikan masalah kemiskinan beserta efek dominonya di Jawa Tengah.

Kemiskinan di Kota Semarang menjadi salah satu dari 10 isu strategis dalam pembangunan daerah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021. Masalah kemiskinan bersifat kemiskinan struktural dan kemiskinan relatif yang keduanya perlu mendapatkan prioritas penanganan secara berkelanjutan. Masalah kemiskinan selalu bersifat multidisiplin mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, politik maupun masalah marginal serta kerentanan kelompok miskin. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi memerlukan dukungan para pihak, terutama dunia usaha dan paling penting adalah partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Jumlah penduduk miskin di Kota Semarang tidaklah besar, tahun 2017 sebesar 4,62% tergolong rendah jika dibandingkan dengan Jawa Tengah (13,10%) dan Nasional sebesar 10,01%. Namun bagi Kota Semarang menurunkan jumlah penduduk miskin dari 4,62% menjadi 3,75% (pada akhir 2021) menjadi sangat sulit mengingat kelompok miskin pada level tersebut

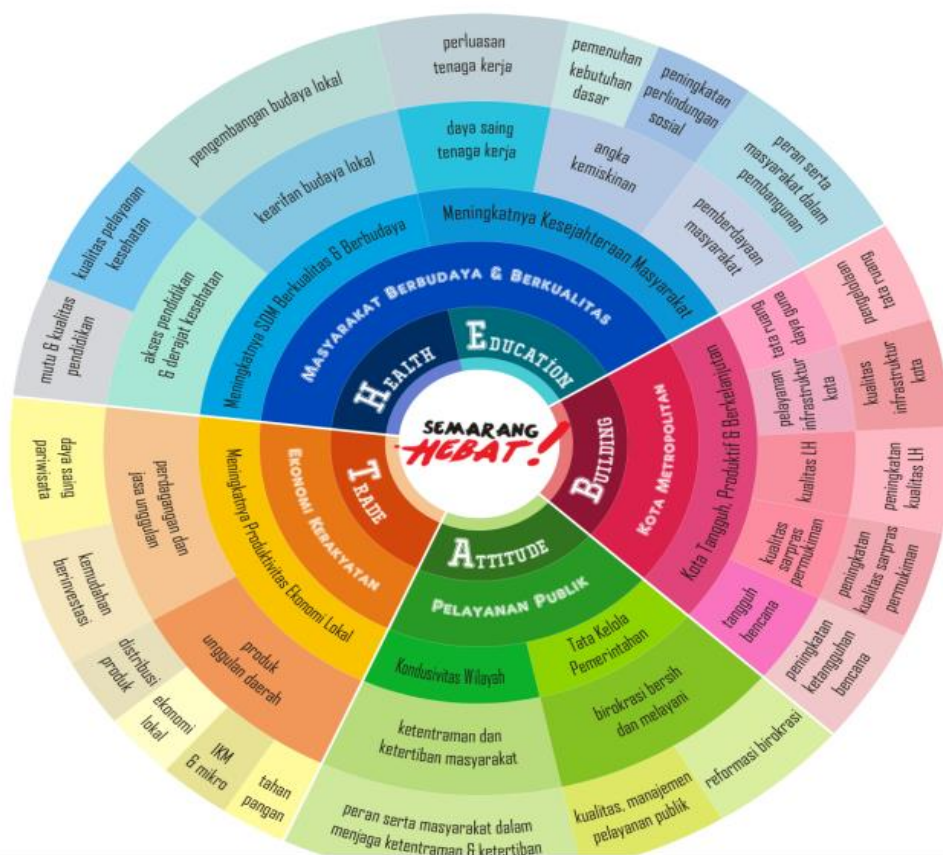
(termasuk keraknya kemiskinan), adalah mereka dari kelompok penganggur, buruh serabutan, usia lanjut dan kepala rumah tangga perempuan dan kelompok rentan lainnya. Masalah kemiskinan selalu tidak bersifat tunggal, tetapi cenderung saling kait mengkait, yaitu masalah ekonomi (ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok, rendahnya kepemilikan aset/kekayaan); sosial (penyandang masalah kesejahteraan sosial, rentan, rendahnya akses pada kelembagaan sosial ekonomi lokal dan terpinggirkan) maupun aspek budaya (yaitu terjadinya marginalisasi, subsisten dan tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan /powerless penting) (Robert Chamber, 2008). Permasalahan kemiskinan bersifat kompleks dan saling tumpang tindih (overlapping) menimpa kelompok miskin atau dengan kata lain merupakan “jebakan/*proverty trap*” bagi perorangan atau kelompok rentan (Sumodiningrat, 2003).

Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 maka perlu dilakukan kebijakan afirmatif dan inovatif dalam penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan program-program kemiskinan dari Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan program-program yang bersifat inovatif di Kota Semarang.

## **B. Inovasi Kebijakan sebagai Pilihan Strategis Menurunkan Kemiskinan**

Inovasi daerah adalah langkah kebijakan secara kreatif baik dari perangkat daerah dan masyarakat dalam rangka penyelesaian isu-isu strategis dalam pembangunan Kota Semarang dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) maupun peningkatan kapasitas kelembagaan daerah. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Pasal 387 UU Nomor 23 Tahun 2024 dinyatakan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintahan daerah mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada

kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan dengan tujuan mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini termasuk penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang yaitu : **Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya** sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021, penjabaran Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang dapat dikemukakan secara skematis sebagai berikut :



Skema Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Sistem Inovasi Daerah yang mengamantkan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan inovasi daerah, terutama pada : (1) inovasi tata kelola

pemerintahan daerah; (2) inovasi pada pelayanan publik dan (3) inovasi daerah lainnya terkait dengan penyelenggaraan urusan kewenangan (PP No 38 Tahun 2017). Pemerintah Kota Semarang dengan pendekatan multisektoral telah melakukan inovasi program-program penanggulangan kemiskinan yang seran langsung menasar pada kelompok masyarakat miskin dan yang bersifat tidak langsung memiliki sasaran bagi kelompok miskin tetapi mengurangi beban biaya hidup kelompok masyarakat miskin dan rentan di Kota Semarang. Program-program tersebut dalam pelaksanaannya bertujuan mempercepat menurunkan penduduk miskin lebih cepat dari capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2030 dengan leading sector Dinas Sosial dan Bappeda Kota Semarang sesuai dengan arahan kebijakan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 - 2021.

Kebijakan pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung dan tidak langsung untuk memerangi permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Kota Semarang, dengan mengacu pada : (1) Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang dan (2) Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2011. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah yang erat kaitannya dengan Misi 1 yaitu : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas. Dengan fokus pada (1) Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat; (2) Menurunkannya angka kemiskinan; dan (3) Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok masyarakat miskin/rentan.

Bantuan kepada keluarga miskin/ rentan dilaksanakan dalam rangka mengurangi beban biaya hidup (kesehatan, pendidikan, akses pelayanan sosial), pemberdayaan kelompok dan perintisan usaha ultra mikro dan usaha mikro (dengan fasilitasi perijinan gratis, pelayanan terpadu Paten, pengurangan pajak/retribusi) dan pemberdayaan kelompok binaan serta pengembangan kelurahan tematik dan forum kota sehat), secara ringkas

dikemukakan sebagai berikut :

1. Mengurangi beban biaya hidup sehingga kelompok miskin dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya;
2. Keluarga miskin atau kelompok rentan dapat memenuhi kebutuhan hidup layak dan memiliki akses dalam pelayanan dasar;
3. Memperluas akses kelompok miskin/rentan dalam pelayanan publik di Kota Semarang.

Pelaksanaan kebijakan yang bersifat inovatif dalam penanggulangan kemiskinan adalah dalam rangka mengurangi kerentanan kelompok miskin dan rentan/ terpinggirkan dengan program-program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Inovasi Program dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang**

No	Staregi Kebijakan Pembangunan	Inovasi dan Tujuan Pelaksanaan Program
1	Pemberian bantuan non tunai kepada keluarga miskin/kelompok rentan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan non tunai kepada keluarga miskin/rentan;</li> <li>• Bantuan bahan pangan pokok bagi keluarga miskin/rentan menjelang Hari Raya dan masa paceklik;</li> </ul>
2	Mengurangi beban biaya hidup keluarga miskin atau kelompok rentan dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.	<p>Melaksanakan program nasional, antara lain dengan menjamin tepat sasaran untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah Sangat Sederhana (RSS);</li> <li>• Subsidi BBM Premium dan Solar.</li> <li>• Subsidi LPG 3 Kg.</li> <li>• Subsidi Minyak Tanah untu RT;</li> </ul>
3	Memperluas akses kelompok miskin/rentan dalam pelayanan publik di bidang pendidikan Kota Semarang untuk (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dan lain-lain).	<p>Bidang Pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KIP;</li> <li>• PKH;</li> <li>• Bea siswa bagi peserta didik dari keluarga miskin;</li> <li>• Program Bidikmisi (pemberian beas siswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat belajar di PT) dari Kemenristek dan Dikti;</li> <li>• Akses pendidikan keaksaraan fungsional (KF) dan kesetaraan;</li> </ul> <p>Bidang Kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan Kesehatan bagi Balita (KMS)</li> <li>• Pemeriksaan Kesehatan bagi Bumil;</li> <li>• KIS;</li> <li>• BPJS;</li> <li>• Universal Health Coveragare (UHC) dari APBD Kota Semarang.</li> <li>• Ambulance Hebat;</li> <li>• Kegiatan dalam pelayanan kesehatan di Posyandu;</li> </ul>

No	Staregi Kebijakan Pembangunan	Inovasi dan Tujuan Pelaksanaan Program
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Gerakan Kota Sehat;</li> <li>Bidang Sosial :</li> <li>• PKH Kesejahteraan Sosial;</li> <li>• Program Kesejahteraan Sosial (KPSKS);</li> <li>• Fasilitasi oleh TKSK bagi penyandang PMKS;</li> <li>Bidang Perumahan dan Pemukiman :</li> <li>• Subsidi Tarif Listrik R1 (PLN sampai dengan daya 900 watt)</li> <li>• Rehabilitasi RTLH;</li> <li>• Peningkatan Akses Air Bersih melalui Pamsimas;</li> <li>• Bantuan Sumur Artesis;</li> <li>• Layanan PAM Bersama dan penampung air bersih;</li> <li>• Pembangunan kampung kumuh (perkerasan jalan lingkungan/RT, jamban dan sanitasi, pembuangan limbah dan jamban komunal);</li> <li>• Penyuluhan dan fasiltasi penanganan buang air besar (BAB), membangun jamban komunal dan bantuan pembuatan jamban sehat.</li> </ul>
4	Meringankan pengeluaran biaya transportasi maka di Kota Semarang terdapat layanan <i>bus rapid transpor</i> (BRT);	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angkutan kota/bus kota <i>rapid transport (BRT)</i> dengan tarif yang relatif murah dan salaing terkoneksi dengan pusat-pusat aktivitas perekonomian kota;</li> <li>• Memperluas jaringan pelayanan angkutan umum;</li> </ul>
5	Kebijakan fiskal untuk meringankan biaya hidup kelompok miskin/rentan	Pemerintah Kota Semarang melaksanakan pembebasan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk bangunan dan lahan dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) < Rp. 120 juta;
6	Pajak dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunkan pajak bagi pelaku usaha UMKM dari 15% menjadi 0,5%;</li> <li>• Pelaku usaha kecil, pedagang kecil dan PKL di Kota Semarang dengan e-retribusi bagi pedagang pasar dan pedagang kecil.</li> </ul>
7	Peningkatan akses kelompok miskin/ rentan dalam program pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan perijinan UMKM di pelayanan terpadu kecamatan (Paten);</li> <li>• Akses kredit modal perbankan dan kredit bagi usaha mikro;</li> <li>• Kredit Usaha Rakyat (KUR);</li> <li>• Kredit Program bagi perintisan usaha baru/ mikro disebut Kredit Wibawa.</li> </ul>

Sumber : Identifikasi Penyusun, 2019

### **C. Memetakan Masalah Kemiskinan dan Kaitannya dengan Inovasi Program Penanggulangan Kemiskinan.**

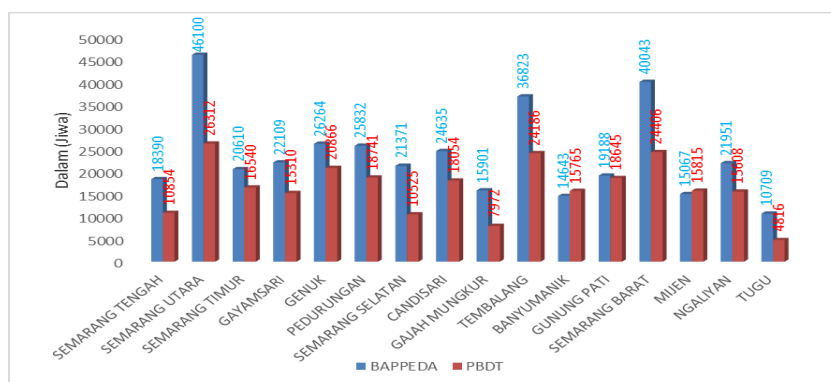
Pemerintah Kota Semarang menetapkan melalui Bappeda dan Dinas Sosial telah melaksanakan perbaikan data dasar PBDT tahun 2015 dan diettapkan dengan SK Walikota Semarang (2015) diketahui jumlah penduduk miskin sebanyak 379.636 jiwa terdiri dari 117.933 KK. Adapun persebarannya berdasarkan wilayah kecamatan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Perincian Penduduk Miskin Berdasarkan Kecamatan di Kota Semarang**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Semarang Tengah	15	6.088 KK	18.390 jiwa
2	Semarang Utara	9	13.775 KK	46.100 jiwa
3	Semarang Timur	10	6.425 KK	20.610 jiwa
4	Gayamsari	7	6.715 KK	22.109 jiwa
5	Genuk	13	8.167 KK	26.264 jiwa
6	Pedurungan	12	7.745 KK	25.832 jiwa
7	Semarang Selatan	10	6.943 KK	21.371 jiwa
8	Candisari	7	7.662 KK	24.635 jiwa
9	Gajahmungkur	8	5.054 KK	15.901 jiwa
10	Tembalang	12	11.194 KK	36.823 jiwa
11	Banyumanik	11	4.642 KK	14.643 jiwa
12	Gunungpati	16	6.171 KK	19.188 jiwa
13	Semarang Barat	16	12.287 KK	40.043 jiwa
14	Mijen	14	4.868 KK	15.067 jiwa
15	Ngaliyan	10	6.925 KK	21.951 jiwa
16	Tugu	7	3.272 KK	10.709 jiwa
<b>Total</b>	<b>16 Kecamatan</b>	<b>177 Kelurahan</b>	<b>117.933 KK</b>	<b>379.636 jiwa</b>

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2017

Secara rinci persebaran penduduk miskin dan pemasalahan terkait dengan kerentanan dan keterbatasan akses pelayanan, digambarkan pada grafik sebagai berikut ini.



Sumber: BAPPEDA Kota Semarang, 2017

**Gambar 1**  
**Persebaran Jumlah Penduduk Miskin Kota Semarang**

Berdasarkan diagram dan peta sebaran penduduk miskin diketahui penduduk miskin tertinggi di Kecamatan Semarang Utara (46.100 jiwa), Kecamatan Tembalang dan Semarang Barat. Kecamatan Semarang Barat



dengan penduduk miskin sebanyak 40.043 jiwa. Sebagian penduduk miskin bertempat tinggal dan melaksanakan aktivitas sosial ekonomi di kawasan pesisir. Tingginya penduduk miskin di beberapa kecamatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi dari alam dan lingkungan (ancaman banjir dan rob, air bersih, rumah tidak layak hubi dan pekerjaan yang tidak tentu). Kecamatan Tembalang, meskipun secara kasat mata perkembangan wilayah menunjukkan peningkatan yang baik sebagai pusat pendidikan, berkembangnya kegiatan perdagangan, namun dilihat dari penduduk asli dari Tembalang tergolong miskin sebanyak 36.823 jiwa, terutama di kelurahan pinggiran. Sebaran pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan KK Berdasarkan Kecamatan**  
**di Kota Semarang**

No	Nama Kec.	Jumlah Kel.	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	PBDT 2015
1	Semarang Tengah	15	6.088	18.390	10.854
2	Semarang Utara	9	13.775	46.100	26.312
3	Semarang Timur	10	6.425	20.610	16.540
4	Gayamsari	7	6.715	22.109	15.310
5	Genuk	13	8.167	26.264	20.866
6	Pedurungan	12	7.745	25.832	18.741
7	Semarang Selatan	10	6.943	21.371	10.525
8	Candisari	7	7.662	24.635	18.054
9	Gajahmungkur	8	5.054	15.901	7.972
10	Tembalang	12	11.194	36.823	24.186
11	Banyumanik	11	4.642	14.643	15.765
12	Gunungpati	16	6.171	19.188	18.645
13	Semarang Barat	16	12.287	40.043	24.406
14	Mijen	14	4.868	15.067	15.815
15	Ngaliyan	10	6.925	21.951	15.608
16	Tugu	7	3.272	10.709	4.816
16 Kecamatan		177	117.933	379.636	264.415 jiwa

*Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2017*

Dengan demikian diketahui penduduk miskin di Kota Semarang berdasarkan hasil pendataan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yakni:

1. Kelompok Sangat Miskin merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap naik turunnya harga bahan pokok dan keutuhan lain sebanyak 39 KK dengan jumlah sebanyak 105 jiwa.
2. Kelompok Miskin merupakan kelompok kurang mampu yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar dan akses kebijakan serta pelayanan dasar sebanyak 17.567 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 55.446 jiwa, dan
3. Kelompok Hampir Miskin (near poor) adasebanak 100.327 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 324.085 jiwa secara relatif dapat memenuhi kebutuhan dasar tetapi mudah jatuh miskin jika mengalami sakit menahun atau kegagalan usaha.

Berdasarkan kajian terebut maka diketahui penyebaran berdasarkan wilayah kecamatan tentang dapat dikemukakan sebagai berikut :

**Tabel 4.**  
**Perincian Penduduk Miskin Berdasarkan Kategori di Kota Semarang**

No	Kecamatan	Kategori Kemiskinan					
		Hampir Miskin		Miskin		Sangat Miskin	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Semarang Tengah	4.105	12.251	1.821	5.500	13	40
2	Semarang Utara	10.927	36.362	2.477	8.219	4	14
3	Semarang Timur	5.364	17.146	914	2.939	3	5
4	Gayamsari	5.825	19.004	707	2.307	-	-
5	Genuk	6.858	22.076	1.115	3.431	2	6
6	Pedurungan	6.853	22.721	649	2.171	-	-
7	Semarang Selatan	5.784	17.764	1.204	3.709	3	4
8	Candisari	6.365	20.331	1.198	3.887	1	2
9	Gajahmungkur	4.595	14.402	432	1.303	-	-
10	Tembalang	9.415	31.082	1.399	4.449	3	6
11	Banyumanik	3.869	12.219	723	2.209	-	-
12	Gunungpati	4.792	14.750	934	2.819	-	-
13	Semarang Barat	10.794	34.986	1.308	4.150	-	-
14	Mijen	3.443	10.762	1.286	3.828	5	15
15	Ngaliyan	6.045	19.181	729	2.187	1	4
16	Tugu	2.529	8.221	440	1.377	4	9

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2015

**D. Program-Program Pembangunan Terpadu dan Penanggulangan**

**Kemiskinan**

Kebijakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan menanganai permasalahan kelompok miskin secara menyeluruh dan ditangi secara terpadu. Dengan memperhatikan komponen pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan non pangan (ternasuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Kondisi Kemiskinan Kota Semarang sebagaimana uraian tersebut diatas secara rinci dapat dijelaskan melalui analisis posisi relatif, antar waktu, efektifitas, relevansi dan keterkaitan, sebagai berikut.

**Tabel 5.**  
**Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Non Pangan Bagi**  
**Penanggulangan Kelompok Miskin**

Konsumsi	Perseptif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Persentase Penduduk Miskin	Di bawah rata-rata provinsi dan Nasional	Efektif menekan jumlah penduduk miskin tiap tahunnya	Menunjukkan perbaikan dengan kinerja penurunan walau tidak signifikan	Sejalan terhadap Nasional maupun provinsi	Indeks Keperarahan Kemiskinan memberikan kontribusi positif dalam menurunkan persentase penduduk miskin (%)
Jumlah Penduduk Miskin	Efektifitas menunjukan upaya-upaya Penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menekan jumlah penduduk miskin cukup efektif	Efektif menekan jumlah penduduk miskin tiap tahunnya	-	-	
Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1)	Dibawah rata-rata nasiional dan provinsi	Cukup baik capaian tahun 2017 lebih baik dibanding tahun sebelumnya	Menunjukkan perbaiakn dengan kinerja penurunan walaupun tidak signifikan	Sejalan terhadap Nasional maupun provinsi	
Indeks Kearahan	Dibawah rata-rata nasiional	Cukup baik capaian	Menunjukkan perbaiakn	Sejalan terhadap	

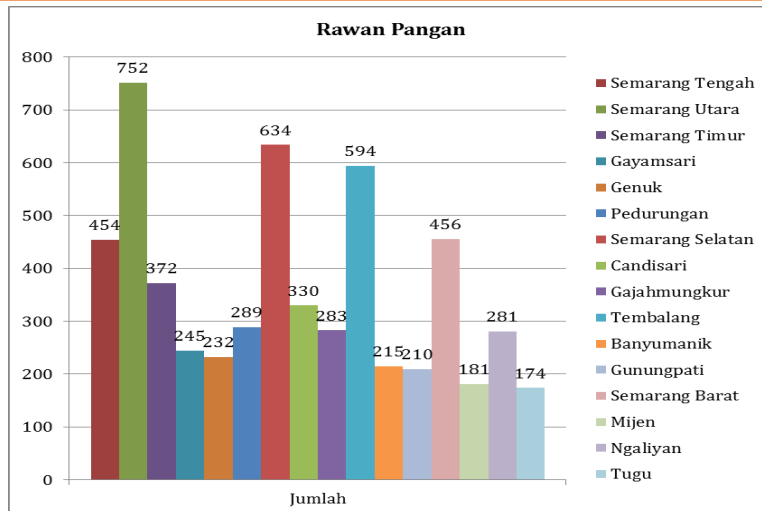
Konsumsi	Perseptif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Kemiskinan (P2)	dan provinsi	tahun 2017 lebih baik dibanding tahun sebelumnya	dengan kinerja penurunan walaupun tidak signifikan	Nasional maupun provinsi	

Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang terutama terkait dengan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang memberikan manfaat terutama menurunnya jumlah penduduk miskin dari tahun 2015 – 2017. Persentase penduduk miskin di Kota Semarang menurun dari 4,97% pada tahun 2015 menurun menjadi 4,85% tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 4,62% lebih rendah daripada persentase penduduk miskin Jawa Tengah (2017) sebesar 13,01% dan rata-rata nasional sebesar 10,64% pada tahun yang sama.

Adapun capaian kinerja program terpadu penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dapat dikemukakan sebagai berikut:

### 1. Pemenuhan Kebutuhan dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Pemenuhan kebutuhan pangan bagi kelompok masyarakat merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia, sehingga tingkat kepentingan dari pangan ini perlu diperhatikan dari sisi pemenuhannya. Pemenuhan kebutuhan pangan erat kaitannya dengan ketahanan pangan penduduk dengan indeks pemenuhan kalori sebesar 2.200 Kkal/Kapita per hari. Gambaran rincian kecamatan yang termasuk dalam penduduk miskin dan erat kaitannya dengan kategori rawan pangan, dikemukakan sebagai berikut:



Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2017

**Gambar 2**

### **Persebaran Penduduk Miskin Rawan Pangan di Kota Semarang**

Berdasarkan data di atas menunjukkan kecamatan yang memiliki penduduk miskin termasuk kategori rawan pangan terbesar adalah Kecamatan Semarang Utara terutama kelompok masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir, kelompok buruh dan penganggur. Sedangkan di Kecamatan Semarang Selatan dan Tembalang secara relatif lebih sedikit, terutama kelompok buruh dan buruh tani, kelompok masyarakat perbendapatan rendah lainnya.

Ketersediaan dan keterjangkauan pangan, terutama jika terjadinya kenaikan harga bahan pokok di pasaran sering terjadi pada musim kemarau panjang dan menjelang hari raya dan akhir tahun. Hal ini menjadi permasalahan penting bagi masyarakat Kota Semarang mengingat bahan pangan harus didatangkan dari kabupaten sekitar (seperti Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal serta Kabupaten Semarang dan sekitarnya). Produksi beras dan jagung di Kota Semarang hanya memenuhi kebutuhan lebih kurang antara 10% - 13% dari kebutuhan masyarakat. Demikian pula bahan pangan berupa ikan laut, ikan air tawar dan daging datang dari daerah lain yang lebih jauh lagi dan bahkan import.

Pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah maka fluktuasi harga, ketiadaan bahan pangan di pasaran seringkali menimbulkan gejolak harga dan keluhan masyarakat. Pola pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara umum belum banyak memanfaatkan pilihan alternatif (penganekaragaman pangan pokok dan bahan pangan substitusi), terutama beras, minyak goreng, gula pasir dan cabai serta terigu. Demikian pula ketika terjadi inflasi yang tinggi, maka pergerakan harga sembako di pasaran akan cepat naik. Masyarakat berpenghasilan rendah menjadi orang yang pertama kali mengeluh atas kenaikan harga bahan pokok. Dalam kondisi seperti ini, maka perlu adanya peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan barang dan pengendalian harga bahan pokok.

## 2. Keterkaitan Program Inovasi Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pelaksanaan program-program inovasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang secara terpadu, selain pemenuhan kebutuhan pangan juga peningkatan kualitas sumberdaya manusia antara lain sebagai berikut :

**Tabel 6.**  
**Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Hasil yang diharapkan**

No	Keterkaitan Program dan masalah yang ditangani	Hasil yang Diharapkan	Perangkat Daerah <i>Leading Sector</i>
1	<b>Tingkat Pengangguran.</b> Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2016 sebesar 66,96% dengan jumlah penduduk yang menganggur mencapai 51.229 jiwa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan TPAK tahun 2016 sebesar 66,96% dengan jumlah penduduk yang menganggur mencapai 51.229 jiwa.</li> <li>• Persentase jumlah penduduk kelompok usia produktif yang mencari pekerjaan dan ibu rumah tangga masih cukup besar</li> </ul>	Dinas Tenaga Kerja dan pemangku kepentingan
2	<b>Angka Putus Sekolah</b> Angka putus sekolah masih terjadi diseluruh jenjang pendidikan, yaitu pada tingkatan SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Kota Semarang tahun 2015 sebesar 0,02%, SLTP/MTs sebesar 0,07% dan SMA/SMK/MA sebesar 0,32%.	Menurunkan persentase anak putus sekolah pendidikan dasar melalui pendidikan luar sekolah dan pendidikan keterampilan	Dinas pendidikan, LPK, PKBM dan pemangku kepentingan
3	<b>Angka Melek Huruf (AMH)</b> Pada tahun 2015 sebesar 99,96%,	Dilaksanakan pendidikan luar sekolah dan persamaan melalui	

No	Keterkaitan Program dan masalah yang ditangani	Hasil yang Diharapkan	Perangkat Daerah <i>Leading Sector</i>
	menunjukkan masih terdapatnya penduduk dengan kondisi usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.	lembaga PKBM	
4	<b>Dibidang kesehatan</b> Berkaitan dengan permasalahan strategis adalah masih terdapatnya angka kematian baik ibu, bayi maupun balita. Angka kematian ibu di Kota Semarang pada tahun 2015 adalah sebanyak 35 kasus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah kematian bayi di Kota Semarang dengan mengaktifkan kader kesehatan dan Suami Siaga;</li> <li>• UHC</li> <li>• Meningkatkan peran Ambulance Hebat Kota Semarang</li> </ul>	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas dan masyarakat
5	<b>Balita Kurang Gizi.</b> Prevalensi balita yang dinyatakan kekurangan gizi khususnya yang mengalami gizi buruk cukup fluktuatif, dimana pada akhir tahun data (2015) indikator ini mengalami penurunan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi;</li> <li>• Pemanfaatan pekarangan bagi pemenuhan gizi</li> <li>• Posyandu aktif</li> <li>• PMT</li> </ul>	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas dan masyarakat
6	<b>Akses Sanitasi dan Air Minum Layak.</b> Masih terdapatnya penduduk di Kota Semarang dengan penggunaan sanitasi dan air minum yang tidak layak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkembangan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak sejak tahun 2015 sebesar 85,78% dan semakin ditingkatkan;</li> <li>• Rumah tangga yang menggunakan air minum layak mencapai 88,30%.</li> </ul>	Disperkim dan PDAM, Pamsimas dan pemangku kepentingan
7	<b>Kepemilikan Rumah Layak Huni (RTH).</b> Keseluruhan, rasio rumah layak huni di Kota Semarang baru mencapai sebesar 81,23%	Masih terdapat sebesar 18,77% dan terdapat rumah penduduk yang menempati lahan milik negara, bantaran sungai dan lahan milik jalan, serta mudak kena banjir dan rob	Disperkim dan DPU untuk sarana jalan dan masyarakat.

Sumber data : dari berbagai sumber dianalisis penyusun

## E. Penutup

Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan inovasi daerah telah memberikan contoh praktek baik dalam rangka penanggulangan kemiskinan secara terpadu yang dilaksanakan antara perangkat daerah bekerjasama dengan dunia usaha dan peran sert masyarakat. Program-program inovasi meliputi dua pendekatan yaitu : (1) mengurangi beban biaya hidup kelompok masyarakat miskin dan (2) program-program yang bersasaran langsung memerangi kemiskinan.

Implementasi program penanggulangan kemiskinan dengan payung hukum, yaitu: Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan (2) Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Kota Semarang tahun 2016 - 2021 yang menggambarkan keberpihakan pembangunan Kota Semarang bagi kelompok miskin, kelompok rentan dan terpinggirkan (marginal) melalui upaya sebagai berikut :

1. Mengurangi beban biaya hidup sehingga kelompok miskin dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya, antara lain bantuan pangan non tunai, bea siswa miskin, angkutan BRT, pelayanan kesehatan dengan BPJS, UHC dan ambulance hebat di Kota Semarang ;
2. Keluarga miskin atau kelompok rentan dapat memenuhi kebutuhan hidup layak dan memiliki akses dalam pelayanan dasar pelayanan dan peningkatan akses air bersih, mencegah BAB sembarangan, penanganan RTH dan peningkatan taman kota sebagai sarana rekreasi keluarga;
3. Memperluas akses kelompok miskin/rentan dalam pelayanan publik antara lain dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, rumah pintar, pengembangan kampung tematik.

Implementasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan akan semakin ditingkatkan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, terutama dari kalangan dunia usaha baik BUMN/BUMD dan swasta (melalui Program Corporate Social Responsibility/CSR), perguruan tinggi melalui KKN Tematik dan Program Pengabdian pada Masyarakat dan penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan partisipasi luas masyarakat baik dari kalangan ulama (melalui Basis, bea siswa sebaya, anak asuh dan lain-lain) meningkatkan pendidikan, kesehatan dan perintisan usaha mikro/kecil.



**DAFTAR PUSTAKA****Peraturan Perundangan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerbit : Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2014.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Penerbit : Kementerian Sosial RI, Jakarta, 1998.
- Perda Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. Penerbit : Bappeda Kota Semarang, Semarang, 2016.
- Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016–2021. Penerbit : Bappeda Kota Semarang, Semarang, 2016.
- Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Penerbit : Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2018.

**Buku Buku**

- A.G. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Chambers, Robert, Kemiskinan dan Aspek Melingkupi, Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Dunn, William, Analisis Kebijakan Publik, (terjemahan), Edisi Revisi, Penerbit : Ghalia Indonesia, Bandung, 2006
- Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, Penerbit : Bayumedia, Jakarta, 2008.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Penerbit : Rineka Cipta, Bandung 2004.